



KR-Abdul Alim

Pemeriksaan senjata api anggota Polres Karanganyar.

DILAKUKAN POLRES KARANGANYAR Cek Senjata Api Dinas

KARANGANYAR (KR) - Wakapolres Karanganyar Kumpul Mardiyanto melaksanakan pemeriksaan senjata api (senpi) inventaris dinas yang dipinjam pakai personel Polres Karanganyar di halaman Wira Satya Polres Karanganyar, Selasa (17/12). Kegiatan ini bentuk pengawasan dan pencegahan terjadinya pelanggaran.

Waka Polres menyampaikan bahwa pengecekan ini adalah pemeriksaan terhadap kondisi senjata api serta kelengkapan administrasi dari pemegang senpi. "Kami laksanakan pengecekan kondisi senpi, ditemukan ada beberapa senjata api yang kotor atau kurang di bersihkan, kami berikan teguran terhadap pemegangnya, dan kami perintahkan untuk rajin dalam merawat senpi, untuk administrasi semua sudah sesuai prosedur," tandas Kumpul Mardiyanto.

Setelah melakukan pemeriksaan, Mardiyanto yang didampingi Kasi Propam Iptu Soeparlan menekankan kepada personel pemegang senpi organik dinas. "Perlu diketahui, pemeriksaan ini bertujuan untuk antisipasi agar tidak terjadi pelanggaran anggota Polri dalam penggunaan Senpi organik dan merupakan salah satu bentuk pengawasan dari pimpinan terhadap anggota," tegasnya.

Selain itu, juga kembali diingatkan kepada personel tentang regulasi dan tahapan penggunaan senjata api dinas. SOP mulai dari penyimpanan, pembawaan, dan regulasi penggunaan senpi sebagaimana Perkap 01 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Dari enam tahapan, salah satunya penggunaan senpi, serta sesuai dengan petunjuk dan arahan Kadiv Propam tentang penggunaan Senpi Organik bagi anggota Polri.

"Ada empat point, dimana kita diperbolehkan menggunakan senpi. Antara lain tindakan pelaku/tersangka dapat menimbulkan luka parah, anggota Polri tidak memiliki alternatif lain dalam menanggapi adanya sesuatu kejahatan. Selain itu, anggota Polri sedang mencegah tersangka yang lari dan mengancam jiwa masyarakat maupun diri sendiri. Penggunaan senpi terhadap anggota Polri juga dapat digunakan apabila memang dalam keadaan yang sangat mendesak dan mengancam diri sendiri maupun masyarakat," jelas Kumpul Mardiyanto.

Dalam penggunaan senpi, lanjut Wakapolres, anggota Polri wajib menyampaikan identitas sebagai anggota Polri. Lalu memberikan peringatan secara keras, bmemerikan waktu yang cukup supaya peringatan dipatuhi. "Hal-hal tersebut dilakukan sebelum melakukan tembakan peringatan. Setelah memberikan peringatan apabila memang tidak diindahkan maka melakukan penembakan yang bersifat melumpuhkan bukan mematikan," ungkapny.

Ia juga mengingatkan, prosedur pengajuan pinjam pakai senjata api, baik materil maupun formilnya, harus sudah terpenuhi. Selanjutnya, diharapkan dijaga baik-baik, digunakan pada waktu yang tepat, dan paling penting tidak sampai senjata api membuat sombang sehingga terjadi pelanggaran. (Lim)-f

OPERASI LILIN DI SUKOHARJO Motor Balap Liar Diamankan



KR-Dok Polres Sukoharjo

Pelaksanaan Operasi Lilin Candi 2024 Polres Sukoharjo di Kartasura.

SUKOHARJO (KR) - Operasi Lilin Candi 2024 Polres Sukoharjo mengamankan 45 motor balap liar di Jalan A Yani Kartasura, Sabtu (21/12) dinihari. Polisi diterjunkan untuk memastikan perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 aman. Operasi dipimpin Kapolsek Kartasura AKP Tugiyu.

Dalam razia yang digelar pada malam hari hingga dinihari, petugas mengamankan 45 unit sepeda motor yang tidak memenuhi standar keselamatan, seperti knalpot tidak sesuai dengan peraturan dan kelengkapan kendaraan yang tidak lengkap. Operasi tersebut juga melibatkan personel Pospam 03 Operasi Lilin Candi 2024 Polres Sukoharjo.

Kapolsek Kartasura AKP Tugiyu mewakili Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit mengungkapkan bahwa razia ini merupakan bagian dari upaya menciptakan situasi yang aman dan kondusif, serta menekan angka kecelakaan yang sering terjadi akibat balap liar. "Kami akan terus melakukan penindakan tegas terhadap kegiatan yang melanggar hukum dan meresahkan masyarakat," tegasnya.

Dengan adanya operasi ini, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku balap liar dan menurunkan angka kecelakaan di wilayah Kartasura. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.

Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit mengatakan, personel yang dilibatkan dalam pengamanan Nataru berasal dari gabungan seperti Polri, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Sukoharjo. Petugas melakukan pengamanan diprioritaskan di tempat-tempat rawan dan objek vital. Selain itu, juga dengan sasaran patroli wilayah. (Mam)-f

DAMPAK KASASI PT SRITEX DITOLAK MA

Puluhan Ribu Buruh Terancam PHK

SUKOHARJO (KR) - Forum Peduli Buruh (FPB) Sukoharjo khawatir puluhan ribu buruh PT Sritex terancam terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), mengingat perusahaan tersebut sampai sekarang terus bermasalah. Setelah diputus pailit oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang, kemudian ada putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan kasasi terkait status pailit.

PT Sritex saat ini sedang mengambil langkah hukum lanjutan berupa pengajuan Peninjauan Kembali (PK). Pihak perusahaan saat ini juga dihadapkan masalah ketersediaan bahan baku menipis dan berdampak pada keberlanjutan operasional.

Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) sekaligus Ketua Serikat

Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo, Sukarno mengatakan buruh menjadi prioritas untuk lebih diperhatikan karena paling terdampak dari perusahaan bermasalah. "Sampai saat ini sudah ada 3.000 karyawan PT Sritex yang dirumahkan pihak perusahaan," jelasnya, Sabtu (21/12).

Menurutnya, jumlah buruh terdampak PT Sritex kemungkinan akan terus bertambah setelah MA menolak kasasi PT Sritex atas putusan pailit Pengadilan Negeri Niaga Semarang. "Perusahaan terus bermasalah dan terbaru MA menolak kasasi. Kami khawatir akan terasa dampak besar bagi buruh tidak hanya dirumahkan tapi bisa juga terkena PHK," tandas Sukarno.

FPB meminta kepada pihak

perusahaan serius dalam menyelesaikan masalah tersebut sehingga nasib buruh menjadi lebih jelas. Di sisi lain, pemerintah diminta turun tangan membantu menyelesaikan masalah perusahaan dan buruh di PT Sritex. "Di satu sisi pemerintah harus membantu pihak perusahaan, di sisi lain dan terpenting menyelamatkan nasib buruh agar tetap bisa bekerja dan tidak terkena PHK," tegasnya.

Dikatakan, FPB Sukoharjo sudah menjalin komunikasi dengan serikat pekerja di PT Sritex. Hasilnya diketahui memang ada ribuan buruh sudah dirumahkan. Selain itu diketahui kondisi perusahaan sekarang bermasalah karena ketersediaan bahan baku menipis. Hal ini berdampak pada operasional per-

usahaan menjadi terbatas. "Apabila bahu bahu habis maka berdampak pada terhentinya operasional perusahaan. Dampak lebih besar dirasakan buruh, karena bisa saja terkena PHK," ungkap Sukarno.

Terpisah, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo, Sumarno mengatakan pihaknya terus memantau kondisi PT Sritex. Permasalahan yang ada sekarang sedang berupaya diselesaikan pihak perusahaan. Khususnya terkait 3.000 buruh dirumahkan PT Sritex karena operasional perusahaan terganggu akibat ketersediaan bahan baku menipis. "Selama dirumahkan, para buruh tersebut juga dipantau oleh pihak-pihak terkait," jelasnya. (Mam)-f

PEMKAB SUKOHARJO BANTU KORBAN LONGSOR

Wilayah Selatan Dapat Perhatian Khusus

SUKOHARJO (KR) - Bencana alam tanah longsor terjadi di wilayah Desa Kamal Kecamatan Bulu, bar-baru ini. Akibat kejadian tersebut, satu rumah warga mengalami kerusakan. Tidak ada korban jiwa dan seluruh penghuni rumah selamat. Petugas sudah melakukan proses evakuasi dan Bupati Sukoharjo Etik Suryani menyerahkan bantuan logistik kepada pemilik rumah.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sukoharjo Ariyanto Mulyatmojo mengatakan tanah longsor di Desa Kamal Kecamatan Bulu menimpa satu rumah milik Paino warga Dukuh Mulworejo RT 02 RW 06 Desa Kamal. Akibatnya, dinding belakang rumah Mulyatmojo ambrol dan retak. Saat kejadian, seluruh penghuni rumah terdiri dari empat jiwa semuanya selamat. Total kerugian yang ditimbulkan akibat tanah longsor diperkirakan Rp 15 juta.

Menurutnya, BPBD

Sukoharjo rutin melakukan pemantauan dan telah memetakan wilayah rawan tanah longsor berada di beberapa desa di Kecamatan Tawang Sari, Weru dan Bulu. Tiga kecamatan tersebut memiliki karakteristik wilayah perbukitan. Banyak rumah warga dan perkampungan penduduk berada di bukit, juga ada lokasi galian C yang berpotensi menyebabkan rawan tanah longsor.

"Wilayah selatan mendapat prioritas penanganan dari Pemkab Sukoharjo, karena banyak perbukitan yang rawan longsor akibat curah hujan tinggi dan angin kencang," tandas Ariyanto.

Di lokasi longsor Desa Kamal Kecamatan Bulu, BPBD Sukoharjo koordinasi dengan perangkat desa dan relawan, membuat jalur air supaya tidak masuk ke rekahan rumah Mulyatmojo, dan menutupi longsor dengan terpal. Selain Desa Kamal, ada enam desa lain yang juga masuk kategori tingkat kerawanan tinggi tanah longsor. Yakni Sanggang, Gentan, Kedungsono Desa Tiyaran (Kecamatan Weru), serta



KR-Dok BPBD Sukoharjo

Bupati Sukoharjo menyerahkan bantuan kepada warga terdampak tanah longsor di Desa Kamal Kecamatan Bulu.

Desa Tawang Kecamatan Bulu.

"Enam desa tersebut berada di wilayah perbukitan dan pernah mengalami bencana alam tanah longsor beberapa tahun lalu. BPBD Sukoharjo meminta kepada warga yang tinggal disana waspada

mengingat curah hujan tinggi sekarang. Warga yang tinggal di wilayah perbukitan kami minta waspada bencana alam, mengingat curah hujan tinggi. Petugas gabungan juga disiagakan memantau titik-titik rawan," ungkap Ariyanto. (Mam)

SUDAH DITETAPKAN GUBERNUR JAWA TENGAH

UMK Sukoharjo 2025 Rp 2.359.48

SUKOHARJO (KR) - Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2025 ditetapkan Gubernur Jawa Tengah sebesar Rp 2.359.488. Angka tersebut sesuai dengan usulan dari Pemkab Sukoharjo. UMK tahun 2025 mengalami kenaikan 6,5 persen dibanding UMK tahun 2024.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Sukoharjo Sumarno, Jumat (20/12) mengatakan, UMK tahun 2025 sudah ditetapkan Gubernur Jawa Tengah dan diumumkan pada Rabu (18/12). Penetapan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561/45 Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024. Dalam penetapan tersebut ditetapkan UMK tahun 2025 Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp 2.359.488.

Angka UMK tahun 2025 yang sudah ditetapkan Gubernur Jawa Tengah tersebut sesuai dengan usulan Pemkab Sukoharjo. UMK tahun 2025 tersebut mengalami kenaikan 6,5 persen dibanding tahun 2024. Angka tersebut ditetapkan daerah setelah melakukan pembahasan bersama dewan pengupahan dan telah diajukan ke

Bupati Sukoharjo. Usulan upah tersebut mengalami kenaikan 6,5 persen sesuai dengan Permenaker 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum.

Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah terkait penetapan UMK tahun 2025 akan menjadi dasar sosialisasi kepada pekerja dan pengusaha. Sebelumnya, tahapan penetapan UMK tahun 2025 sudah dilakukan Disperinaker Sukoharjo, dimulai dari rapat bersama dewan pengupahan melibatkan serikat pekerja dan pengusaha. Selanjutnya diputuskan angka usulan UMK tahun 2025 sebesar Rp 2.359.488. Angka usulan UMK tersebut juga sudah bisa diterima oleh buruh dan pengusaha.

Dalam rapat dewan pengupahan, sempat terjadi perbedaan persepsi antara serikat buruh dan pengusaha. Buruh menganggap angka kenaikan upah minimum 6,5 persen masih kurang, sedangkan pengusaha keberatan dengan aturan Permenaker 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum yang menyebutkan kenaikan upah 6,5 persen.

"Meski masih menganggap ku-

rang, buruh bisa memahami situasi dan menerima kenaikan angka 6,5 persen. Begitu pula pengusaha yang awalnya keberatan. Setelah kami beri pemahaman, akhirnya bisa menerima. Bagi pengusaha memang ini berat," ungkap Sumarno.

Apabila dipaksakan upah naik tinggi, lanjut Sumarno, akan memberatkan pengusaha dan berdampak pada keuangan perusahaan yang pada akhirnya bisa memaksa terjadinya pengurangan pekerja atau PHK. "Mayoritas usaha di Kabupaten Sukoharjo ini padat karya. Satu industri saja bisa punya pekerja ribuan bahkan puluhan ribu orang. Apabila terjadi masalah di perusahaan, maka ribuan orang pekerja ini juga terkena dampaknya," tegasnya.

Ketua Forum Peduli Buruh (FPB) sekaligus Ketua Serikat Pekerja Republik Indonesia (SPRI) Sukoharjo, Sukarno mengatakan dengan usulan UMK tahun 2025 buruh di Sukoharjo mengapresiasi angka kenaikan upah yang sudah ditetapkan pemerintah pusat sebesar 6,5 persen. Angka tersebut berlaku secara nasional disemua daerah di Indonesia ter-

masuk di Kabupaten Sukoharjo.

"Buruh melihat angka 6,5 persen meski belum sesuai dengan hasil survei KHL di Kabupaten Sukoharjo sebesar 5-8 persen, namun tetap diapresiasi. Sebab angka 6,5 persen sudah berada ditengah dan antara 5-8 persen. Artinya tidak terlalu merugikan buruh dan perusahaan. Akhirnya buruh bisa menerima angka kenaikan upah tahun 2025 sebesar 6,5 persen. Diharapkan perusahaan juga mematuhi kenaikan UMK tersebut," tandas Sukarno.

Menurutnya, sejak beberapa tahun terakhir buruh selalu dirugikan dengan penerapan regulasi yang ditetapkan pemerintah dalam PP 51 atau PP 36. Sebab, angka upah yang ditetapkan sangat rendah dan tidak sesuai harapan buruh. Terlebih lagi upah yang diterima rendah tidak sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Penerapan KHL dipilih buruh karena sesuai dengan kondisi riil di lapangan dan sudah dilakukan survei lapangan mengenai harga kebutuhan pokok, yang selanjutnya digunakan dasar penentuan upah buruh. (Mam)-f

BNNK Temanggung Lakukan Tes Urin Pemandu Karaoke

TEMANGGUNG (KR) - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Temanggung menggelar razia dan pemeriksaan tes urin pada pengunjung, pemandu karaoke dan karyawan di tempat hiburan malam di Kota Salatiga. Kepala BNNK Temanggung AKBP Triatmo Hamardiyono mengatakan razia dan tes urin dilaksanakan bersama Polresta Salatiga dan Kodim 0714/Salatiga.

"Kami terlibat dalam pengawasan peredaran narkoba di tempat hiburan di Salatiga," jelas Triatmo

Hamardiyono, Sabtu (21/12). Menurutnya, tempat hiburan malam yang menjadi sasaran adalah



KR-Istimewa

BNNK Temanggung saat melakukan tes urin pemandu karaoke di Salatiga.

yang diduga rawan peredaran dan penyalahgunaan gelap narkoba di wilayah Kota Salatiga yang merupakan wilayah zonasi BNN Kabupaten Temanggung.

Salah satu yang menjadi sasaran, kata AKBP Triatmo, adalah di tempat hiburan malam di wilayah Kelurahan Sidorejo Lor Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga. Tujuan razia untuk melakukan pengawasan secara rutin pada tempat hiburan malam yang ada di wilayah zonasi BNNK Temanggung, serta melaksanakan deteksi dini

bagi masyarakat ditempatkan berisiko.

Disampaikan pada kegiatan tersebut petugas BNN melakukan screening di tempat dan sebanyak 50 orang di test urine yaitu pengunjung, LC (pemandu karaoke) dan karyawan tempat karaoke. "Hasil dari razia ini semuanya negatif," jelas Triatmo.

AKBP Triatmo juga mendorong kepada pengelola tempat hiburan malam untuk menjadi penggiat dalam pencegahan peredaran dan penyalahgunaan gelap narkoba. (Osy)-f